

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Chintya Nabella Asharini^{1*}, Dyah Ratnawati H², Gideon Setyo Budiwitjaksono³

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: 17013010239@student.upnjatim.ac.id; dratnawati67@gmail.com; gideon.ak@upnjatim.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 24 April 2024

Revised : 02 Mei 2024

Accepted : 30 Mei 2024

Keywords:

Keywords:

Value For Money, Financial Performance

ABSTRACT

New Public Management provides consequences for local governments to implement performance-based budgets with a mechanism that follows good planning, implementation and control stages. Capital Expenditure Growth is an indicator of the performance of Regional Work Units (SKPD), which currently shows a growth rate that is less than optimal. Value For Money is a guideline for financial management towards achieving SKPD performance. This research aims to examine Value For Money, namely Economic factors, Efficiency and Effectiveness on Financial Performance in SKPD East Java Province. This research uses a quantitative approach with the object of the Budget Realization Report and uses a sample of 10 Regional Work Unit in East Java Province during the 2017-2020 period, and uses a purposive technique based on predetermined criteria. The research results show that Value for Money, which consists of economic factors, efficiency and effectiveness, together has an influence on Financial Performance. Individually, economic factors have a negative influence on financial performance. Meanwhile, the Efficiency and Effectiveness factors have no influence on Financial Performance.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Corresponding Author:

Chintya Nabella Asharini

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: 17013010239@student.upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi indikator bagi pemerintahan daerah untuk menilai pencapaian kinerja keuangan. UU Nomor 23 Tahun 2014 mengemukakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan, kompetensi, dan keleluasaan untuk melakukan otonom secara mandiri terhadap seluruh aspek pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan

[1]. Pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efektif setelah mereka mempunyai otonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menyumbangkan sejumlah dana melalui APBD untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana [2].

APBD adalah perwujudan dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan standar yang menjadi acuan penilaian suatu daerah yang dapat dikategorikan dalam penilaian keefektifan, mandiri dan efisiensi dan akuntabilitas guna menilai hal ini, kinerja keuangan pemerintah berfungsi sebagai standar yang digunakan untuk mengukur strategi keuangan pemerintah pada tahun mendatang [3]. Metode *value for money* adalah metode pengukuran kinerja keuangan. Karena merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen, yang merupakan alat untuk meningkatkan standar tanggung jawab dan pengambilan keputusan, maka penilaian kinerja sangatlah penting [4].

Halim dan Kusufi (2013:132) mendeskripsikan *value for money* sebagai istilah untuk menganalisis aspek keuangan dan non keuangan guna menilai kinerja organisasi guna mengevaluasi efektivitas program kerja di sektor publik, dengan menilai dari perspektif non-finansial dan finansial.

Halim dan Kusufi (2013:132), faktor finansial dan non finansial digunakan untuk menilai *value for money* yang merupakan program kerja di sektor publik untuk mengevaluasi keekonomian, efisiensi, dan efektivitas kegiatan, dan kinerja organisasi [5].

Hal ini relevan dengan teori *New Public Management* yang menyatakan pemerintah harus menggunakan penganggaran kinerja ketika menerapkan mekanisme manajemen dengan mengandalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang efisien [3]. VFM memungkinkan pemerintah daerah untuk membentuk tata kelola daerah yang bertanggung jawab, transparan, ekonomis, dan efisien yang merupakan ciri *good governance* [6]. Oleh karena itu, konsep *Value for money* sangat penting untuk mendukung pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

Besarnya alokasi modal yang disalurkan APBD menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah secara signifikan [7]. Hal ini bertujuan agar daerah dapat membangun infrastrukturnya melalui alokasi modal daerah. Pada Tabel 1 berikut disajikan faktanya bahwa alokasi belanja modal tidak selalu meningkat:

**Tabel 1. Pertumbuhan Belanja Modal SKPD
Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019**

No	SKPD	Pertumbuhan Belanja Modal			Keterangan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Dinas Pendidikan	(15,20)	(15,81)	(12,05)	Berkurang	Berkurang	Berkurang
2.	Dinas Kesehatan	(18,77)	(8,19)	13,63	Berkurang	Berkurang	Berkurang
3.	Dinas PU Bina Marga	(15,6)	(15,24)	(22,48)	Berkurang	Berkurang	Berkurang
4.	Dinas Perhubungan	(1,6)	(4,04)	(3,16)	Berkurang	Berkurang	Berkurang

No	SKPD	Pertumbuhan Belanja Modal			Keterangan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(1,6)	(2,55)	(4)	Berkurang	Berkurang	Berkurang
6.	Dinas Koperasi dan UKM	(5,73)	(3,01)	(10,93)	Berkurang	Berkurang	Berkurang
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1,97)	(6,92)	(4,07)	Berkurang	Berkurang	Berkurang
8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(18,15)	(10,40)	(4,07)	Berkurang	Berkurang	Berkurang
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4,06)	(2,17)	(1,55)	Berkurang	Berkurang	Berkurang
10.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(4,44)	(5,9)	(21,08)	Berkurang	Berkurang	Berkurang

Sumber: Website, diolah kembali

Pada Tabel 1 menunjukkan pertumbuhan belanja modal SKPD pada pemerintah Jawa Timur setiap tahun selalu mengalami penurunan. Pengeluaran untuk pemeliharaan juga dianggap sebagai belanja modal jika dilakukan dalam rangka penciptaan modal untuk menambah aset tetap atau aset lain yang memberi manfaat dalam banyak periode akuntansi. Tujuan dari pengeluaran ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas, serta mempertahankan atau memperpanjang masa manfaat.

Value for money yang diukur dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektifitas mempunyai dampak terhadap kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo seperti yang diungkapkan oleh Hamid, A., & Lamuda, I. (2019) dalam penelitiannya Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* [8]. Melalui peningkatan belanja modal di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, penelitian ini berupaya untuk mengukur kinerja keuangan dengan mengevaluasi dan menilai pengaruh Value for Money dalam hal ini ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

KAJIAN TEORI

Teori stewardship merupakan gambaran situasi manajer yang memprioritaskan tujuan dan sasaran utama organisasi di atas tujuan mereka sendiri. Donaldson & Davis 1989, dalam [9]. Teori stewardship menjelaskan bahwa upaya seorang manajer berpedoman pada kepentingan bersama. Steward akan berusaha untuk bekerja sama meskipun prinsipal dan steward mempunyai kepentingan yang berbeda, karena mereka bekerja demi kepentingan bersama dan sesuai dengan tindakan principal dapat menjadi pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan bersama [9].

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah menilai status pekerjaan sehubungan dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan, yang berkaitan dengan data mengenai kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, efektivitas penggunaan sumber daya, seberapa baik kegiatan dilaksanakan sehubungan dengan hasil yang diharapkan, dan seberapa baik tindakan mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja adalah proses menentukan apakah tujuan yang dihasilkan dari tujuan strategis organisasi telah tercapai. Pengukuran kinerja juga merupakan teknik manajemen lain yang meningkatkan tanggung jawab dan pengambilan keputusan [10]. Sebagaimana diuraikan di atas, pengukuran kinerja adalah suatu proses atau instrumen yang digunakan untuk mendokumentasikan atau mengevaluasi sejauh mana kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dilaksanakan dalam rangka menentukan kemajuan organisasi dan meningkatkan standar akuntabilitas dan pemantauan.

Value for Money

Ketika menilai kinerja pemerintah, input, output, dan outcome harus dipertimbangkan [11]. *Value for Money* adalah konsep manajemen yang mempertimbangkan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas bagi perusahaan sektor publik [11]. Oleh sebab itu, konsep ini penting bagi pemerintah karena memberikan memberikan beberapa manfaat [12], yaitu :

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik
- b. Meningkatkan standar pelayanan pemerintah
- c. Menurunnya harga pelayanan publik dikarenakan peningkatan produktivitas dan penghematan input
- d. Alokasi belanja untuk kepentingan umum
- e. Meningkatkan kesadaran tentang penggunaan uang negara untuk menjamin akuntabilitas

Ekonomi

Ekonomi diartikan sebagai mencari masukan dengan harga terbaik untuk kuantitas dan kualitas tertentu. Satuan moneter digunakan dalam ekonomi untuk membandingkan input dan nilai input. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari seberapa besar sektor publik yang dapat memanfaatkan sumber daya inputnya, terutama dengan mengurangi belanja yang boros dan tidak efektif [11]. Jika suatu tugas dapat mengurangi atau menghilangkan pengeluaran yang tidak diperlukan, maka hal tersebut dianggap ekonomis [10]. Istilah "tingkat ekonomi", sering disebut sebagai "berhemat", menyatakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tugas atau memperoleh sesuatu. Ekonomi dan biaya operasi (cost of operational) saling berkaitan [10]. Meneliti pengeluaran perusahaan sektor publik dapat membantu menentukan seberapa hemat anggarannya. Data anggaran belanja serta realisasinya dibutuhkan untuk mengukur tingkat perekonomian. Menurut Siregar, tingkat ekonomi dapat dihitung dengan rumus [13]:

$$\text{Ekonomi} = (\text{Input}) / (\text{Nilai Input}) \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan:

Input : belanja pegawai
 Nilai input : belanja daerah

Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan untuk menghasilkan keluaran tertentu dengan jumlah masukan yang paling sedikit atau keluaran yang setinggi-tingginya dengan sekumpulan

masukannya tertentu. Analisis efisiensi membedakan input dan output berdasarkan standar atau tujuan kinerja yang telah ditentukan sebelumnya [11]. Ketika suatu hasil dapat diperoleh dengan dana serta sumber daya yang sedikit (*spending well*), maka proses kegiatan operasional dianggap efisien [10].

Tingkat efisiensi dan metode operasi saling terkait. Suatu proses kegiatan operasional dianggap efisien ketika menggunakan sumber daya dan sumber daya keuangan sesedikit mungkin untuk suatu tugas atau keluaran tertentu. Efisiensi adalah ukuran seberapa baik input dan output dibandingkan [10]. Tingkat efisiensi menurut Siregar [13]:

$$\text{Efisiensi} = (\text{Output}) / \text{Input} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan:

Output : pendapatan daerah

Input : belanja daerah

Efektivitas

Efektivitas ialah sejauh mana tujuan program dapat dicapai. Salah satu cara untuk menggambarkan efektivitas adalah membandingkan outcome dengan output [11]. Efisiensi adalah hubungan yang terjalin antara produksi dan tujuan yang diperlukan. Pencapaian tujuan kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana efektivitas dipahami. Apabila tujuan akhir dari kebijakan dapat tercapai, maka tindakan operasional dianggap efektif [10].

Tingkat efektivitas suatu organisasi menunjukkan apakah tujuannya telah tercapai atau tidak. Suatu perusahaan dianggap berhasil jika tujuannya tercapai, tanpa memperhitungkan biaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Ada kemungkinan biaya akan melebihi anggaran sebanyak dua atau mungkin tiga kali lipat. Apabila suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuannya, maka hal tersebut merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilannya [11]. Menurut Siregar tingkat efektivitas [13] dihitung dengan:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Outcome}) / \text{Output} \times 100\% \quad (3)$$

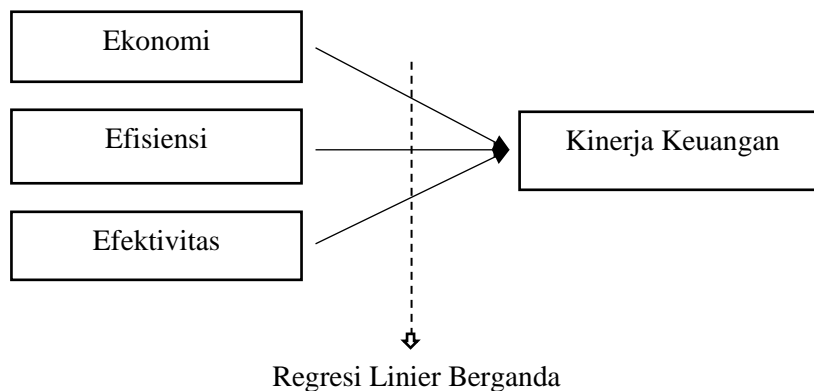
Keterangan:

Outcome : pendapatan asli daerah

Output : pendapatan daerah

Metode

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, pada 10 Departemen yang menjadi objek penelitian di berbagai SKPD (Dinas) di Provinsi Jawa Timur. SKPD Departemen yang terdaftar di BPKAD tahun 2017–2020 diteliti menggunakan website bbpkad.jatimprov.go.id untuk mengetahui pengaruh ekonomi, efisiensi, efektivitas terhadap kinerja. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel data yang memenuhi kriteria: a) SKPD (Dinas) Provinsi Jawa Timur terdaftar di BPKAD tahun 2017-2020; b) SKPD (Dinas) Provinsi Jawa Timur yang menyajikan data secara lengkap mengenai indikator pengukuran kinerja berdasarkan *Value for Money*. Berdasarkan kriteria sampel data penelitian yang dianalisis berjumlah 40 (10 x 4 periode pengamatan). Teknik pengumpulan data yang meliputi akses situs resmi dan penerimaan laporan realisasi anggaran tahunan melibatkan penggunaan dokumentasi. Metode analisis data yang menggunakan Analisis Regresi Berganda dengan aplikasi SPSS Versi 22 meliputi uji F (model fit) dan uji t (secara parsial). Sebelum analisis dapat dimulai, data penelitian harus melalui Uji Normalitas dan asumsi klasik terlebih dahulu.



Gambar 1. Model Teoritis

Keterangan:

H1 : Ekonomi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

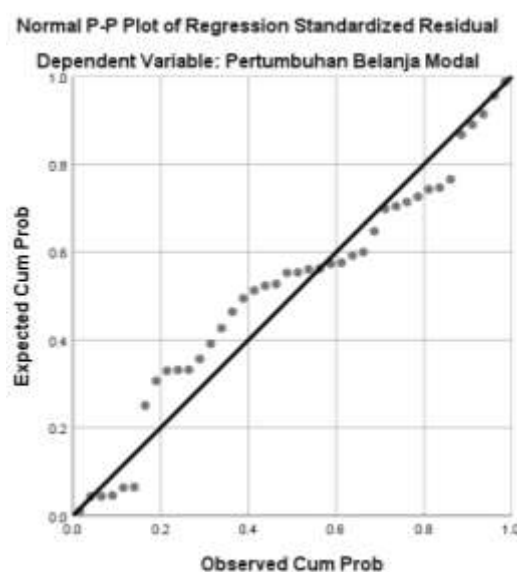
H2 : Efisiensi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

H3 : Efektivitas memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori stewardship untuk menyelidiki keadaan di sekitar manajer yang memprioritaskan tujuan dan sasaran utama organisasi di atas kepentingan mereka sendiri Donaldson & Davis (1989). Teori stewardship menyatakan bahwa tindakan seorang manajer didasarkan pada kepentingan bersama. Sekalipun steward dan prinsipal mempunyai kepentingan yang berbeda, steward akan tetap berusaha untuk bekerja sama demi kepentingan terbaik prinsipal dan sesuai dengan tindakannya untuk mencapai tujuan bersama. Menurut teori psikologi dan sosiologi ini, manajer berfungsi sebagai pelayan yang melayani kepentingan pemilik [9]. Berikut ini hasil analisis deskriptif Uji Normalitas dan Asumsi klasik.

Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Metode Grafik

Normality Probability Plot digunakan untuk melakukan uji normalitas pada penelitian ini. Dari gambar 2, diketahui bahwa titik-titik tersebut mengikuti garis diagonal, yang artinya berdistribusi teratur.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

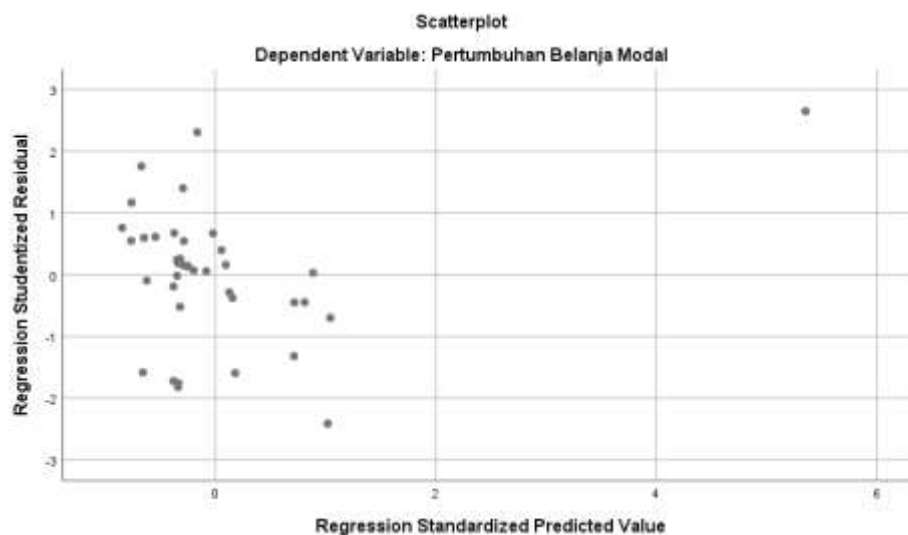
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	330.601	94.523		3.498	.001		
Ekonomi	-330.005	94.524	-.520	-3.491	.001	.914	1.094
Efisiensi	-.020	.084	-.037	-.235	.816	.798	1.252
Efektivitas	.318	.471	.103	.675	.504	.868	1.152

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 2, nilai tolerance $\geq 0,10$ dan VIF ≤ 10 , maknanya tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 3, menunjukkan adanya pola yang tidak menentu (pola gelombang, melebar atau menyempit), serta titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, yang maknanya tidak adanya heteroskedastisitas dalam penelitian.

Uji Autokorelasi**Tabel 3. Hasil Nilai Hitung Durbin Watson**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.519 ^a	.270	.209	.529139	2.236

a. Predictors: (Constant), Efektivitas, Ekonomi, Efisiensi

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Belanja Modal

Dengan taraf signifikansi 5% yaitu pada nilai 1,6589 dan nilai 4 -du atau 2,3411 maka nilai du diperoleh dari nilai Distribusi Tabel Durbin Watson berdasarkan Tabel 3 dengan memperhitungkan nilai $k = 3$ (jumlah variabel independen) dan $N = 40$ (jumlah data penelitian). Nilai DW hitung sebesar 2,236 yang berada di antara 1,6589 hingga 2,3411 menunjukkan tidak terdapat gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel terikatnya adalah bagaimana kondisi perekonomian, efikasi, dan efisiensi mempengaruhi kenaikan belanja modal. Berikut adalah Temuan studi regresi linier berganda yang melihat bagaimana faktor independen (variabel ekonomi, efisiensi dan efektivitas) mempengaruhi variabel dependen (pertumbuhan belanja modal).

Tabel 4. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	330.601	94.523		3.498	.001
	Ekonomi	-330.005	94.524	-.520	-3.491	.001
	Efisiensi	-.020	.084	-.037	-.235	.816
	Efektivitas	.318	.471	.103	.675	.504

Sumber : Hasil analisis SPSS

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut ini:

$$Y = 330,601 - 330,005X_1 - 0,020X_2 + 0,318 + \varepsilon$$

Persamaan Regresi menyatakan bahwa nilai konstanta (α) 330,601, menunjukkan apabila nilai variabel independen =0, maka pertumbuhan belanja modal = 330,601. Nilai koefisien Ekonomi = -330,005, menunjukkan bahwa nilai ekonomi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan belanja modal. Dengan asumsi bahwa variabel independen lain konstan, pertumbuhan belanja modal turun sebesar 330.005 untuk setiap unit kenaikan nilai ekonomi. Nilai koefisien efisiensi sebesar -0,020 menunjukkan bahwa nilai efisiensi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan belanja modal. Untuk setiap peningkatan efisiensi satu satuan, pertumbuhan belanja modal menurun = 0,020, dengan asumsi variabel independen lain konstan. Dan nilai koefisien Efektivitas = 0,318 menunjukkan bahwa nilai efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan belanja modal. Artinya setiap nilai efektivitas meningkat satu satuan maka pertumbuhan belanja modal meningkat = 0,318 dengan asumsi variabel independen lain konstan.

Uji Hipotesis**Uji Kecocokan Model (Uji F)****Tabel 5. Hasil Uji Kecocokan Model (ANOVA)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.723	3	1.241	4.433	.009 ^b
Residual	10.080	36	.280		
Total	13.803	39			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Efektivitas, Ekonomi, Efisiensi

Berdasarkan Tabel 5, diketahui variabel terikat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,009 \leq 0,05$.

Uji Parsial (Uji t)**Tabel 6. Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	330.601	94.523		3.498	.001
Ekonomi	-330.005	94.524	-.520	-3.491	.001
Efisiensi	-.020	.084	-.037	-.235	.816
Efektivitas	.318	.471	.103	.675	.504

Sumber : Hasil analisis SPSS

Tabel 6 menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kenaikan belanja modal yang ditunjukkan dengan temuan uji t yang menunjukkan nilai signifikansi ekonomi $0,001 < 0,05$. Mengingat nilai efisiensi sebesar $0,816 > 0,05$, maka pengaruh faktor efisiensi terhadap kenaikan belanja modal sangat kecil. Sedangkan nilai signifikansi faktor Efektivitas sebesar $0,504 > 0,05$ menunjukkan pengaruh parsial yang tidak signifikan terhadap peningkatan belanja modal.

Pembahasan**Pengaruh Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan “Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan” dinyatakan diterima. Faktor ekonomi merupakan salah satu indikator *Value for Money* yang mencerminkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk mendukung pengeluaran pada kondisi yang paling minimal dari SKPD. Perbandingan antara jumlah belanja pegawai (input) dengan belanja dinas (nilai output) menunjukkan tingkat operasional organisasi yang dianggap ekonomis. Dengan besarnya pengeluaran untuk belanja pegawai semakin rendah sementara belanja dinas pada jumlah tetap, maka menunjukkan tingkat yang semakin ekonomis. Artinya organisasi berjalan pada tingkat biaya operasional yang paling minimal. Jika dikaitkan dengan kinerja keuangan yang diukur menggunakan pertumbuhan belanja modal mempunyai hubungan negatif. Ini artinya semakin bertambah tingkat ekonomi organisasi, yang berarti semakin tinggi belanja pegawai, dapat menyebabkan pertumbuhan belanja modal menurun.

Kinerja keuangan yang diukur menggunakan pertumbuhan belanja modal mampu dipengaruhi oleh faktor ekonomis yang dalam hal ini mencerminkan kegiatan operasional dengan mengurangi biaya yang tidak perlu atau pemborosan [14]–[16]. Hubungan yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi jumlah pengeluaran belanja pegawai dapat mengurangi atau menurunkan porsi untuk belanja modal.

Temuan penelitian ini relevan dengan Siregar (2018), Bayu dkk (2020), dan Perdana dkk (2020) menunjukkan bahwa *value for money*, faktor ekonomi mempengaruhi kinerja keuangan [3], [17], [18]. Namun, temuan ini bertentangan dengan Purwiyanti (2017) dan Irmawati (2015) yang menemukan kondisi ekonomi kecil berdampak terhadap kinerja keuangan [14], [15].

Pengaruh Efisiensi terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian hipotesis mengemukakan “Efisiensi mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan” ditolak. Faktor Efisiensi merupakan salah satu metrik *Value for Money* yang menggambarkan keluaran pekerjaan tertentu yang dapat diselesaikan dengan jumlah dana dan sumber daya paling sedikit dari SKPD. Dengan membandingkan jumlah pendapatan daerah (output) dan jumlah belanja daerah (input) yang dikaitkan dengan kriteria kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat diketahui tingkat efisiensi kegiatan operasional. Jika dikaitkan dengan kinerja keuangan yang diukur dengan pertumbuhan belanja modal, faktor efisiensi tidak memberikan pengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal semata-mata tidak ditentukan oleh semakin efisiensinya operasional organisasi. Artinya semakin naik pertumbuhan belanja modal lebih ditentukan oleh besarnya proposi yang dialokasikan pada belanja modal. Disamping itu karakteristik belanja modal dapat dirasakan manfaatnya lebih dari satu tahun periode, sementara pengelola SKPD kecenderungan memiliki motif jangka pendek karena terkait dengan periode jabatan.

Kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan pertumbuhan belanja modal tidak mampu dipengaruhi oleh faktor efisiensi yang artinya menggunakan lebih sedikit sumber daya untuk mendapatkan hasil kerja terbaik (Mardiasmo : 2018 ; Mahsun : 2006).

Hasil penyelidikan ini relevan dengan penelitian Purwiyanti (2017) dan Irmawati (2015) mengemukakan bahwa tidak ada hubungan antara kinerja keuangan dengan *value for money* yang ditentukan oleh karakteristik efisiensi [14], [15]. Namun Penelitian ini membantah temuan Hamid dan Lamuda (2019), Mulyanigtyas (2018), Siregar (2018), Bayu et al (2020), dan Perdana et al (2020) bahwa faktor ekonomi mempengaruhi kinerja keuangan melalui *Value for Money* [3], [17], [18].

Pengaruh Efektivitas terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan “Efektivitas memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan” dinyatakan ditolak. Faktor Efektivitas merupakan salah satu indikator *Value for Money* yang mencerminkan tingkat pencapaian tujuan atau hasil program yang ditetapkan oleh SKPD. Membandingkan jumlah pendapatan asli daerah (*outcome*) dan jumlah pendapatan daerah (*output*) menggambarkan besarnya manfaat dan keuntungan dalam memaksimalkan dana dari daerah. Jika dikaitkan dengan kinerja keuangan yang diukur dengan pertumbuhan belanja modal, faktor efektivitas tidak memberikan pengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal tidak hanya ditentukan oleh semakin efektifnya operasional organisasi. Artinya meningkatnya belanja modal lebih ditentukan oleh proporsi alokasi dengan mempertimbangkan kebijakan berdasarkan kemampuan setiap SKPD, dan tidak ditentukan oleh banyaknya pendapatan asli daerah yang berhasil diperoleh. Dan juga karakteristik belanja modal bersifat jangka panjang atau lebih dari satu tahun/ periode.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Mulyanigtyas (2018), Lubis dan Hafni (2017), Khalikussabir (2017), dan Suryantari dan Ulupui (2016) yang menyatakan bahwa

Value For Money dari faktor efektivitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun temuan ini bertolak belakang dengan Ulfa. dkk (2018), Hamid dan Lamuda (2019), Siregar (2018), Bayu dan Sam (2020), Perdana. dkk (2020) yang menemukan *Value For Money* dari faktor ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan [19]–[21].

Pengaruh *Value for Money* terhadap Kinerja Keuangan

Peningkatan belanja modal menunjukkan bahwa semua faktor *Value for Money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas) secara keseluruhan berdampak pada kinerja keuangan yang dinilai melalui pertumbuhan belanja modal. Hal ini berarti pertumbuhan belanja modal dari SKPD dapat ditentukan oleh ke tiga faktor *Value for Money* yang tidak dapat terpisah atau harus menjadi satu kesatuan

KESIMPULAN.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SKPD Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan Pendekatan *Value For Money*, dapat disimpulkan faktor ekonomi faktor ekonomi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sementara faktor efisiensi dan efektivitas tidak berpengaruh. Artinya aspek Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas secara keseluruhan dapat digunakan untuk menilai *Value for Money* dan berdampak pada kinerja keuangan SKPD (Dinas) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 - 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ditasari Rollis Ayu and Sudrajat M Agus, “Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur,” *Invent. J. Akunt.*, vol. 4, no. 2, pp. 1–14, 2020.
- [2] M. C. Dewi, “Implikasi undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap pegawai dinas pertambangan di daerah,” *Pros. SNMEB (Seminar Nas. ...)*, no. 23, pp. 470–476, 2018.
- [3] H. A. Siregar, “Analisis Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Melalui Pendekatan Value For Money dalam Konteks New Public Management dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Provinsi Riau,” *Bilancia*, vol. 2, no. 1, pp. 85–94, 2018.
- [4] R. Astuti, “Apakah Belanja Pemerintah Pusat Bersinergi Dengan Belanja Daerah? Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Indonesia Does Central Expenditure Spent in Local Synergize with Local Expenditure? Case Study: Regencies/Cities in Indonesia,” *J. Anggar. dan Keuang. Negara Indones.*, vol. 4, no. 1, 2022.
- [5] I. Ardilla and A. A. Putri, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi,” *J. Ris. Akunt. dan Bisnis*, vol. 15, no. 1, pp. 78–85, 2015.
- [6] P. Ikhwan, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia),” *Artik. Ilm.*, pp. 1–20, 2017.
- [7] R. R. Pradita, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur,” *J. Akunt. Unesa*, vol. 1, no. 2, pp. 1–28, 2012.
- [8] A. Hamid and I. Lamuda, “Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money,” *Gorontalo Account. J.*, vol. 2, no. 1, p. 31, 2019, doi: 10.32662/gaj.v2i1.556.
- [9] S. T. Jamaludin Iskak, “Analisis Corporate Governance, Corporate Environmental Concerns, Dan Corporate Environmental Strengths Untuk Memprediksi Audit Risk Pada Kantor Akuntan Publik (Di Jakarta),” *J. Paradig. Akunt.*, vol. 1, no. 2, p. 487,

- 2019, doi: 10.24912/jpa.v1i2.5019.
- [10] M. Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2006.
- [11] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI, 2018.
- [12] Renyowijoyo and Mundro, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. 2008.
- [13] H. A. Siregar, “Analisis Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Melalui Pendekatan Value For Money dalam Konteks New Public Management dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Provinsi Riau,,” *Bilancia*, vol. 2, no. 1, pp. 85–94., 2018.
- [14] Mahmudi, “Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta :Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,,” vol. 9, no. 2014, pp. 77–89, 2005.
- [15] A. Hartati, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi: Performance Measurement/Pengukuran Kinerja*, no. July. 2020.
- [16] Sugiarto, *Sektor Akuntabilitas Publik*, vol. 4, no. 1. 2016.
- [17] T. A. Perdana, R. A. Budiantoro, and Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra, “Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis Value For Money,,” *J. Inov.*, vol. 16, no. 2, pp. 339–346, 2020.
- [18] M. Bayu and A. S. SAM, “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money Pemerintah daerah Kabupaten Berau,,” *Accountia J. (Accounting Trust. Inspiring, Authentic Journal)*, vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2022.
- [19] K. Arjasa and K. J. Tahun, “Analisis kinerja keuangan pemerintah desa arjasa, kecamatan arjasa, kabupaten jember tahun 2018-2020,,” vol. 10, no. 02, pp. 94–105, 2023, doi: 10.26460/ja.v11i1.2990.
- [20] E. I. Ulfa, A. Made, and E. Dianawati, “Analisis Kinerja Apbd Dengan Pengukuran Value for Money Pemerintah Kota Malang (Tahun Periode 2011-2015),,” *J. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–10, 2020, doi: 10.21067/jrma.v6i1.4215.
- [21] W. A. Rahman, “Analisis Value for Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau,,” p. 80, 2021.